

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar

Yogi Ilhami¹, Pebriyenni¹, Muslim Tawakal²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

E-mail: yogiilhami010396@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1), dan (2), dinyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/ atau Desa. Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat dasar dan syarat administratif. Bagaimanapun suatu proses politik harus diletakkan pada nilai yang paling luhur, yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik”

Tujuan pemberian Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan.

Masalah pengangguran telah menjadi hal yang urgen yang begitu menakutkan khususnya di daerah-daerah yang baru berkembang seperti kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya jumlah penduduk.

Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah pencari kerja yang cukup besar di Kabupaten Tanah Datar, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja bagi para pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup tentang pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan hubungan industrial. Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1956 dan diatur dalam Undang-undang no 12 tahun 1956. Meskipun sudah menjadi daerah otonom, masih banyak terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran. Pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah

masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesempatan kerja atau usaha yang sedikit. Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Deskriptif Kualitatif. Data diambil dengan teknik wawancara dan observasi. Dengan panduan wawancara peneliti mewawancarai Camat Kecamatan Tanjung Emas, dan 4 (empat) Wali Nagari di Kecamatan Tanjung Emas. Pada penelitian ini, peneliti mengambil Kecamatan Tanjung Emas sebagai sampel penelitian dengan variabel bebas pada penelitian ini adalah dampak otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penurunan angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar. Bapak Zainudin, S.Sos, selaku Sekretaris Kecamatan Tanjung Emas sebagai narasumber dalam penelitian ini diajukan 7 pertanyaan yang berhubungan dengan dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap dokumen foto dan data statistik yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. Data yang sudah dikumpulkan diolah menjadi pernyataan deskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan narasumber dengan mengajukan 7 pertanyaan, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar tergolong sedang, tapi berkurang penganggurannya tetap ada, karena setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan,

memproduksi, para tenaga kerja. Di SMK juga memproduksi tenaga kerja. Tetapi tidaklah seluruh aspek yang dilahirkan dari perguruan tinggi dan sekolah kejuruan dapat tertampung di Kabupaten Tanah Datar. Karena aspek-aspek khusus, apalagi yang mengarah kepada teknologi, yang membutuhkan tenaga kerja Kabupaten Tanah Datar tidak punya.

2. Pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi, Cuma pertumbuhan boleh dikatakan sedang karena kerja petugas kita dilapangan khususnya dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Keluarga Berencana (KB) telah bekerja, berusaha secara efektif dilapangan, namun ada sebahagian kecil masyarakat berpendapat bahwa “Banyak Anak Banyak Rezeki”.
3. Barangkali dengan cara menekan, kita harus berusaha, khususnya pemerintah dan swasta yang punya usaha, yang bisa diadakan di Kabupaten Tanah Datar agar menyerap putra-putri calon tenaga kerja yang khususnya di Kabupaten Tanah Datar dan tidak menyepelkan tenaga kerja karena beberapa aspek di bidang skil, tetapi skil-skil itu bisa dilatih sehingga tidak mengimpor tenaga kerja dari luar.
4. Jumlah lapangan kerja sesuai dengan pertumbuhan kerja masih jauh, mungkin 1 : 3, *contoh* ; jumlah lapangan kerja hanya 1 adapun $\frac{1}{4}$ sampai $\frac{3}{4}$ tetapi kebutuhan adanya lapangan kerja 3. Beberapa kasus ada tenaga kerja dihasilkan 1, tetapi yang bisa ditampung hanya $\frac{1}{4}$ dari tenaga kerja yang ada.
5. Seperti telah yang disampaikan, putra-putri yang telah mendapat pendidikan diperguruan tinggi dengan segala jurusan ditambah dengan sekolah kejuruan, mungkin telah menuntut ilmu dari luar Tanah Datar. Tetapi kemampuan Tanah Datar dalam rangka Otonomi Daerah itu sendiri belum sanggup mengadakan lapangan kerja, karena kurang adanya

lapangan pekerjaan yang sesuai dengan aspek atau skil yang telah diperoleh dan ditambah lagi dengan kemauan dan kemampuan tenaga kerja itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga terjadinya pengangguran yang tinggi karena efek dari pendidikan yang di tempuh, para pencari kerja itu malas menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, contoh ; seperti petani yang bisa memanfaatkan teknologi, tapi nyatanya dikatakan oleh putra/putri yang sedang membutuhkan pekerjaan tersebut, menganggap kerja kesawah/keladang ataupun bertani itu tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tetapi mereka berasumsi belum bekerja di perusahaan maupun pegawai negeri berarti belum bisa dikatakan bekerja.

6. Pemerintah daerah masih berupaya menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui penggandengan para pengusaha, para pemodal untuk menanamkan sahamnya di Kabupaten Tanah Datar dan menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya khususnya untuk putra/putri Kabupaten Tanah Datar yang telah menempuh ilmu pendidikan tinggi dan memiliki skil khusus yang bisa dilatih untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh para pemanfaat tenaga kerja tersebut.
7. Otonomi Daerah dapat mengurangi karena khususnya dibidang pemerintahan daerah itu sendiri menggunakan tenaga-tenaga seperti pengangkatan tenaga harian lepas (honorar) yang dipekerjakan pada pemerintah daerah untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan tenaga kerja putra/putri daerah yang mungkin punya skil kearah ilmu yang dia miliki dan kebutuhan demi pelayanan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah ini memang terbukti dapat menyebabkan penurunan angka pengangguran karena Otonomi Daerah ini dapat mengurus daripada kesejahteraan hidup masyarakat di daerah tersebut.
2. Pertumbuhan lapangan pekerjaan belum sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kabupaten Tanah Datar dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.
3. Tindakan pemerintah Daerah dalam mengatasi Angka Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar yaitu nya dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan di sektor informal seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) , membuat kegiatan dilapangan pekerjaan, menyarankan agar masyarakat melaksanakan kegiartan yang swadaya atau lebih pribadi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menggali potensi yang ada di masyarakat supaya menjadi masyarakat yang mandiri.

Sehubung dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain:

1. Diharapkan kepada Instansi terkait untuk dapat membuka lapangan kerja supaya pengangguran ini dapat diatasi
2. Diharapkan kepada individu supaya memiliki kreativitas dan

dapat membuka lapangan kerja baru supaya tidak terjadinya lonjakan angka pengangguran

terhadap perekonomian Indonesia.
Jurnal ekonomi dan bisnis dharma andalas. Vol 21 Nomor 2.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Poyoh, dkk.2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.*Jurnal Agri-sosio ekonomi UNSRAT. Vol 13 No 1A.
- BPS.2017-2018.*Tanah Datar Dalam Angka.* 2017-2018: Badan Pusat Statistik
- D.Priastiwi, H. Handayani.2019. *Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan,upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.* Diponegoro Journal Of Economics. Vol 1 No 1.
- Hartanto, Trianggono,B, Masjkuri, Siti,U. 2017. *Analisis jumlah penduduk, pendidikan,upah minimum dan produk domestic regional bruto (PDRB) terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.* Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. Vol 02 No 1.
- Malik, A. 2015. *Implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan lingkup kementerian dalam negeri.* Vol 7 No2.
- Nadir, S.2013. *Otonomi Daerah dan desentralisasi Desa.* Jurnal politik profektif.Vol.1 Nomor 1.
- Perwira, I. 2015. *Konstitusionalitas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.* Jurnal ilmu hokum. Vol 2 No 3.
- Probosiwi, R.2016. *Pengangguran dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.* Jurnal Ples. Vol 15 No 2.
- Rossa, Yeni del, Agus imran,dan abdilla. 2019. *Pengaruh inflasi, kebijakan moneter dan pengangguran terhadap perekonomian Indonesia.*
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung: Alfabeta.
- Sukardi.2007.*Metodologi penelitian Pendidikan,*Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 23 tahun2014.
- Urtalina Faga,A, Sudibia I,K.2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/Kota di Bali.*E-Jurnal EP Unud.Vol 7 No 10.